



Kementerian Lingkungan Hidup /
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Republik Indonesia

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

RENCANA KERJA 2025

Deputi Bidang Tata Lingkungan dan
Sumber Daya Alam Berkelanjutan



Deputi Bidang Tata Lingkungan dan
Sumber Daya Alam Berkelanjutan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

RENCANA KERJA 2025

Deputi Bidang Tata Lingkungan dan
Sumber Daya Alam Berkelanjutan



RENCANA KERJA 2025

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada seluruh **Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025** Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan atas dedikasi, kerja keras, dan kerja sama yang telah diberikan dalam proses penyusunan dokumen ini.



Foto oleh: Luke Wait Photography

Ditulis, disusun dan diterbitkan oleh Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Penanggung Jawab:

Sigit Reliantoro

Tim Penyusun (berdasarkan abjad):

Ardoni Eka Putra, Ariyanto, Ginanjar Puji Nugroho, Haviz Kurniawan,
Krisna Kumar, Laela Nur Anisah, Nicholas Rolando, Nugroho Indra
Windardi, Prabudi Winarto, Rhesa Darojat, Rakhman, Sehryna Ishak,
Siti Muzayamah, dan Siti Rahma Utamai Dewi.

Penyunting dan Tata Letak:

Johan Bhaktiar, Ressa Nur Fitriansyah , dan Sehryna Ishak



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
DEPUTI TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
BERKELANJUTAN**

KEPUTUSAN

DEPUTI TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP

NOMOR: *15 Tahun 2025*

TENTANG

RENCANA KERJA DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA
ALAM BERKELANJUTAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DEPUTI TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup No.SK 483 Tahun 2025 telah ditetapkan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan perlu menetapkan Rencana Kerja Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
6. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3791);
7. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.



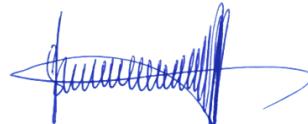
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN TENTANG RENCANA KERJA DEPUTI TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN TAHUN 2025
- KESATU : Rencana Kerja Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam:
- a. Penyusunan Rencana Kerja unit kerja lingkup Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2025;
 - b. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran unit kerja lingkup Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2025; dan
 - c. Pengendalian Program dan Kegiatan lingkup Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2025.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : / April 2025

DEPUTI TATA LINGKUNGAN DAN
SUMBER DAYA ALAM
BERKELANJUTAN KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP/BADAN
PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP,



SIGIT RELIANTORO
NIP. 19681111 199703 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
3. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
4. Inspektur Utama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
5. Direktur Lingkup Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan



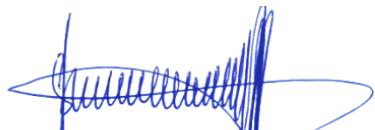
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2025–2029, sekaligus sebagai tindak lanjut pelaksanaan arah kebijakan dan program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup. Dokumen ini memuat arah kebijakan, sasaran, serta program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 untuk memperkuat tata kelola lingkungan hidup, menjaga kualitas ekosistem, dan meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renja Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2025 dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber
Daya Alam Berkelanjutan



SIGIT RELIANTORO



Foto oleh: Luke Wait Photography



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Hal. 12

01

Bab Pendahuluan memuat latar belakang dari dokumen Rencana Kerja Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan tahun 2025, Struktur organisasi, dan SDM lingkup Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.

CAPAIAN KINERJA

Hal. 19

Bagian capaian kinerja memuat capaian-capaian target hasil kerja Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan tahun sebelumnya.

02

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Hal. 35

03

Bab Rencana Kerja Tahun 2025 memuat strategi dalam mendukung Program Prioritas Nasional Tahun 2025, Rencana Kerja Tahun 2025, dan Pagu Anggaran.

04

PENUTUP

Hal. 50

Bab penutup menjadi akhir dari rangkaian dokumen Rencana Kerja Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2025.

Lampiran

Hal. 52

Lampiran memuat rincian rencana kerja dan cascading kinerja unit kerja Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2025 serta rincian anggaran masing-masing kegiatan.

05

01

PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keberlanjutan pemanfaatannya demi kesejahteraan generasi kini dan mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 hadir sebagai panduan strategis untuk mencapai visi pembangunan nasional "Indonesia Emas 2045", dengan mengusung tema rancangan teknokratik "Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema ini selaras dengan komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan dan menempatkan pengelolaan sumber daya alam sebagai pilar penting dalam mencapai kemajuan bangsa.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup memegang peran penting dalam mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan dengan mendukung pencapaian 8 (delapan) Asta Cita yang menjadi fondasi RPJMN 2025-2029. Beberapa Asta Cita yang relevan dengan tugas KLH/BPLH antara lain adalah Indonesia yang Lestari, Adil, dan Makmur; Indonesia yang Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan; serta Indonesia yang Berdaya Saing. Lebih lanjut, KLH/BPLH berkontribusi signifikan terhadap Prioritas Nasional, yaitu Kemandirian bangsa melalui ekonomi hijau/biru dan ketahanan ekologi dan Prioritas Nasional dan Harmonisasi lingkungan hidup dan budaya untuk masyarakat adil-makmur.

Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Berkelanjutan memiliki tanggung jawab strategis dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam tata kelola lingkungan hidup. Dengan meningkatnya tantangan lingkungan, seperti perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, diperlukan langkah-langkah terintegrasi untuk mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, rencana kerja Deputi mencakup empat fokus utama, yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, serta inventarisasi lingkungan hidup.



AMDAL merupakan instrumen penting dalam pengelolaan dampak lingkungan yang timbul akibat aktivitas pembangunan. Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Berkelanjutan berperan dalam meningkatkan kualitas penyusunan, penilaian, dan pengawasan AMDAL agar lebih responsif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan pembangunan. Dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko, dan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan tidak hanya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rencana kerja ini, strategi utama mencakup penguatan kapasitas pemangku kepentingan, penyempurnaan regulasi, serta pengembangan sistem monitoring.

KLHS merupakan instrumen perencanaan strategis yang digunakan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan, rencana, dan program (KRP). Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa KLHS menjadi landasan dalam setiap proses perencanaan pembangunan, terutama di sektor-sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, seperti energi, transportasi, dan tata ruang.

Ekosistem gambut dan mangrove memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim, penyediaan jasa ekosistem, dan penghidupan masyarakat lokal. Namun, kedua ekosistem ini menghadapi ancaman serius akibat konversi lahan, kebakaran, dan eksploitasi berlebihan. Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Berkelanjutan berkomitmen untuk memperkuat pengelolaan ekosistem ini.

Inventarisasi lingkungan hidup menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait tata kelola sumber daya alam dan lingkungan. Melalui inventarisasi yang komprehensif, Deputi dapat mengidentifikasi potensi dan masalah lingkungan secara akurat.

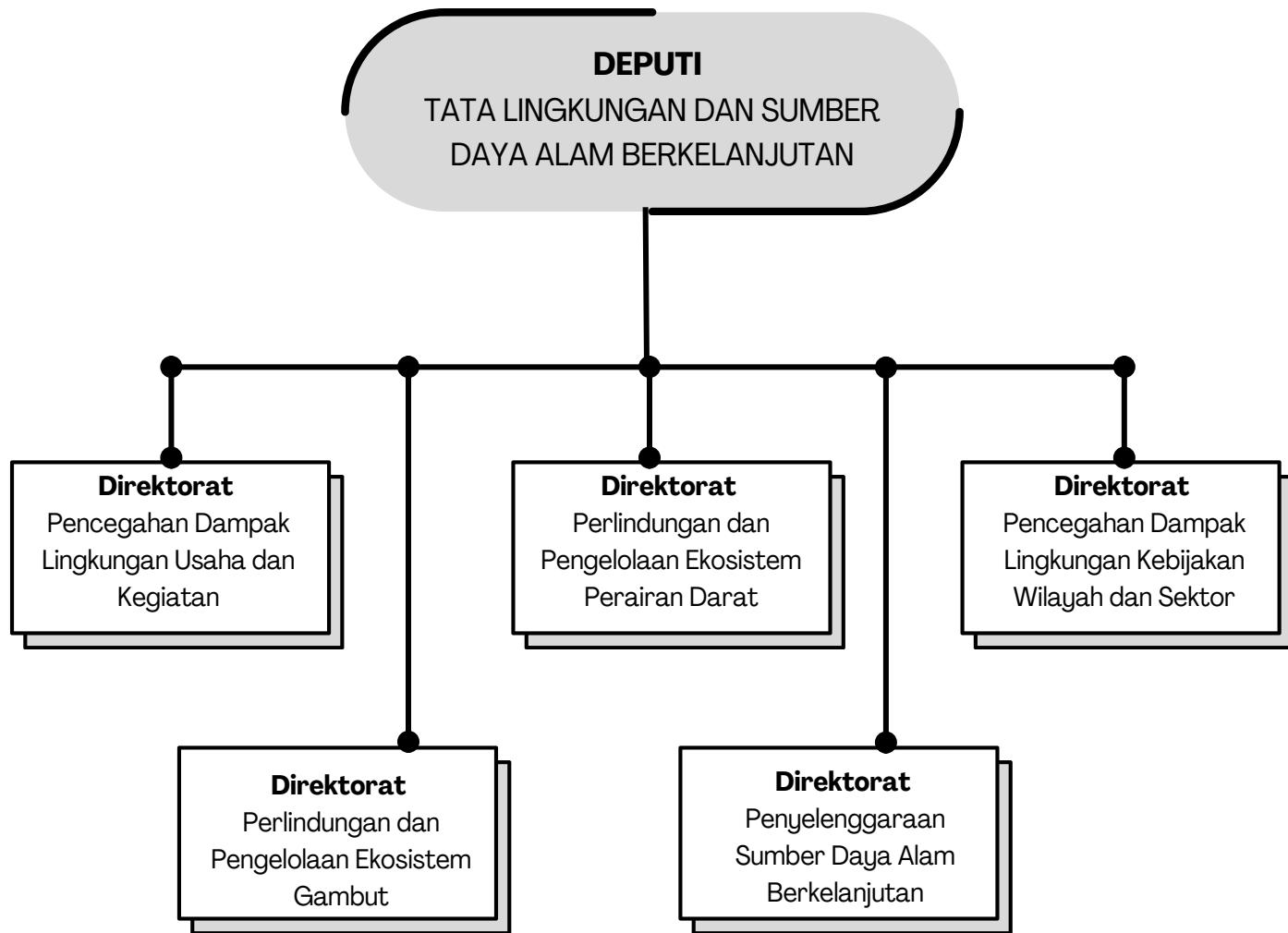
Rencana kerja Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis ilmu pengetahuan. Dengan mengintegrasikan AMDAL, KLHS, pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, serta inventarisasi lingkungan hidup, dan berkomitmen untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Langkah ini sejalan dengan visi nasional untuk menciptakan harmoni antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.



Foto oleh: Raditya

STRUKTUR ORGANISASI

DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN



Sumber:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2024



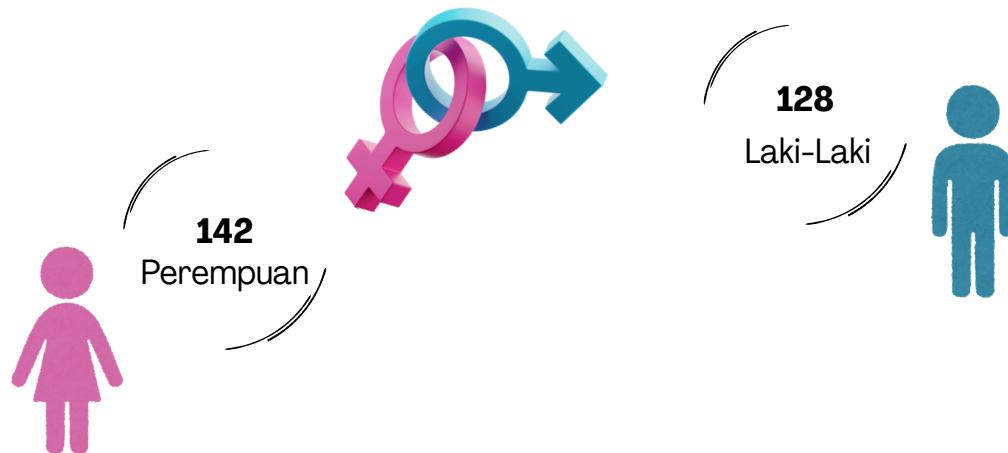
Foto oleh: Rossi Agung

SUMBER DAYA MANUSIA

DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN

Sumber daya manusia Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan berjumlah 270 orang. Sejumlah pegawai tersebut terbagi atas 5 direktorat dan dibantu dengan tata usaha. Sebaran jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh perempuan.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kemajuan sebuah organisasi, baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, baik dinilai dari jumlah pegawai per jenis jabatan, tingkat pendidikan, tingkat golongan maupun tingkat usia. Perbandingan SDM tersebut mempengaruhi capaian target Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan pada setiap rencana kerja yang disusun.



02

CAPAIAN KINERJA



PEMENUHAN SASARAN PROGRAM

Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (TLSADB) merupakan deputi baru yang dibentuk di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Pembentukan deputi ini merupakan hasil penataan kelembagaan yang menggabungkan dan menyelaraskan beberapa direktorat yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dalam struktur baru tersebut, sejumlah direktorat yang sebelumnya tergabung kini dipisahkan dan disusun kembali di bawah koordinasi Deputi Bidang TLSADB sesuai dengan mandat dan fungsi strategis di bidang tata lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan memiliki 12 Indikator Kinerja program pada tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian indikator kinerja program (IKP) Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Program	Capaian Tahun 2024		
	Target	Realisasi	%
Sistem Kajian Dampak Lingkungan dan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup	1 Sistem	1 Sistem	100%
Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	1000 Layanan	1739 Layanan (Terbit 1559 SK)	173%
Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Jasa Lingkungan Tinggi	2 Layanan	2 Layanan	100%
Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	67,85 Poin	69,94 Poin	103%
Dokumen KLHS yang terjamin Kualitasnya dan Terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	40 Rekomendasi Kebijakan	72 Rekomendasi Kebijakan	180%



PEMENUHAN SASARAN PROGRAM

Indikator Kinerja Program	Capaian Tahun 2024		
	Target	Realisasi	%
Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	1 Rekomendasi Kegiatan	1 Rekomendasi Kegiatan	100%
IELH yang disusun dan diimplementasikan dalam Pembangunan	1 Rekomendasi Kegiatan	1 Rekomendasi Kegiatan	100%
Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	1 Rekomendasi Kegiatan	1 Rekomendasi Kegiatan	100%
Jumlah Danau yang dikendalikan Kerusakannya	15 Danau	15 Danau	100%
Jumlah Mata Air yang memiliki Rencana Pemulihannya	100 Mata Air	50 Mata Air	50%
Jumlah Bangunan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	230 Unit	255 Unit	110%
Terehabilitasinya Hutan Mangrove	700 ha	725 ha	103%
Rata-Rata			110%



Sumber:

- LKJ Direktorat PDLUK, PDLKWS, dan PPEPD Tahun 2024
- Rencana Kerja Tahun 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Sistem Kajian Dampak Lingkungan dan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup

Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup mencakup kegiatan seperti evaluasi mutu dokumen Amdal, penerapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria), serta penilaian kinerja TUK/LUK yang akan diintegrasikan sebagai fitur Uji Kelayakan dalam sistem Amdalnet, yang merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional (PPN) ke-6 dalam RPJMN 2020-2024.

Pada tahun 2024 Direktorat PDLUK telah melakukan evaluasi kinerja Tim Uji Kelayakan di tingkat Provinsi sebanyak 12 dan ditingkat kabupaten/kota sebanyak 12 dengan total 24, hasil melebihi dari target yang telah ditetapkan pada renstra sebanyak 21 evaluasi kegiatan KPA/TUK, kegiatan evaluasi kinerja KPA/TUK dilakukan dengan mengacu pada formulir penilaian administrasi dan substansi proses persetujuan lingkungan di KPA/TUK daerah.

Pada tahun 2024 telah dilakukan Evaluasi Mutu Dokumen Amdal Perorangan dan LPJP pada 12 instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan 12 instansi Dinas Lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Target evaluasi LPJP tahun 2024 sebanyak 50 dokumen Amdal, sampai dengan Desember 2024 telah terlaksana evaluasi mutu dokumen amdal sebanyak 71 dokumen Amdal pada 34 LPJP, hasil melebihi dari target yang telah ditetapkan pada renstra sebanyak 64 Dokumen Amdal.



Pengembangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) berupa peraturan dan pedoman teknis merupakan acuan bagi seluruh stakeholder kajian dampak lingkungan di Indonesia. Pada tahun 2024 Direktorat PDLUK telah melakukan Penyusunan NSPK Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Kegiatan sebanyak 7, dimana melebihi 5 dari target renstra.

IKP

Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan

Pada tahun 2024 Direktorat PDLUK telah melakukan Layanan permohonan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sebanyak 1739 Layanan, hasil melebihi dari target yang telah ditetapkan sebanyak 205 Layanan dan penerbitan SK sebanyak 1559, dimana hasil melebihi dari renstra sebanyak 75 dokumen (Penilaian Amdal, adendum Amdal dan RKL-RPL serta penerbitan SKKL dan IL, Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dan/atau Izin Lingkungan (IL), Penilaian audit lingkungan hidup, dan Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan/izin lingkungan.



Pelaksanaan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dilakukan dengan metode yaitu secara Daring. Pemeriksaan secara Daring dilakukan dengan memanfaatan teknologi video conference (*ZOOM Cloud Meetings*). Pelaksanaan pemeriksaan Formulir UKL-UPL secara Daring dilaksanakan secara 1 (satu) tahap dengan menghasilkan PKPLH. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait yang membidangi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota.

Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan telah menyelenggarakan Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) terhadap 48 kegiatan dan Pemeriksaan DPLH terhadap 48 kegiatan.

Pada tahun 2024, telah dilakukan proses audit lingkungan hidup wajib berkala dan audit lingkungan hidup yang diwajibkan atas ketidaktaatan terhadap 26 audit, yaitu audit lingkungan hidup wajib berkala.



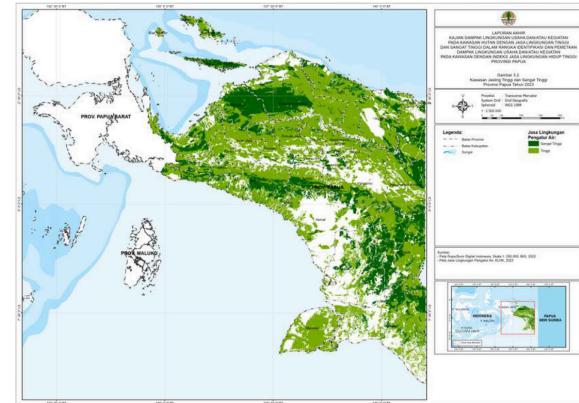


IKP

Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Jasa Lingkungan Tinggi

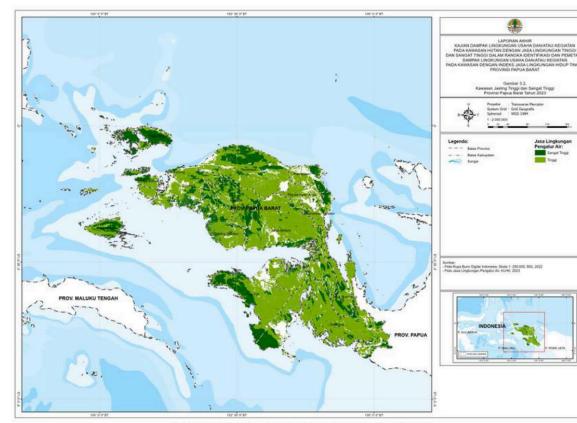
Pada tahun 2024, kegiatan Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi telah sesuai target renstra yaitu sebanyak 2 layanan yang dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pada tahun 2024 ini telah tersedia data-data spasial pendukung yang diperlukan antara lain Peta Dasar Digital RBI skala 1:250.000 Provinsi Papua, Data Digital Peta Jasa Lingkungan Hidup Tinggi dan Sangat Tinggi (Pengatur Air) Tahun 2019 Provinsi Papua, Data Digital Peta Jasa Lingkungan Hidup Tinggi dan Sangat Tinggi (Pengatur Air) Tahun 2023 Provinsi Papua, Data Digital Sebaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (Desember 2023) Provinsi Papua, Data Digital Sebaran Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan (Desember 2023) Provinsi Papua, Data Digital Sebaran Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Pertambangan (Desember 2023) Provinsi Papua, Data Digital Penutupan Lahan hasil penafsiran Citra Landsat LCDM (The Landsat Data Continuity Mission) 8 OLI liputan tahun 2019 dan tahun 2023 Provinsi Papua.



Gambar 1. Peta Areal Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tinggi dan Sangat Tinggi Tahun 2023 Provinsi Papua

Gambar 2. Peta Areal Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tinggi dan Sangat Tinggi Tahun 2023 Provinsi Papua Barat



Gambar 3.2 Kawasan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi dan Sangat Tinggi Provinsi Papua Barat Tahun 2023



IKP

Indeks Kualitas Ekosistem Gambut

Pada Tahun 2024 ini telah dilaksanakan kegiatan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut pada 30 KHG di Provinsi Aceh dengan pendanaan dari APBN murni 2024, serta 3 KHG di Provinsi Riau dengan sumber pendanaan dari GEF-6 IMPLI Project. Sebaran KHG dan pagu anggaran pelaksanaan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut.

Perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi ekosistem gambut, yaitu fungsi lindung atau fungsi budi daya. Parameter yang digunakan adalah kanal, kejadian kebakaran hutan/lahan serta penutupan lahan. Data yang digunakan dalam perhitungan IKEG adalah Peta FEG skala 1:50.000 olahan Tahun 2024, Peta Area Terdampak Kanal, Data Areal Terbakar pada tahun 2023, dan Data Penutupan Lahan tahun 2023.

Pada tahun 2024, sudah dilakukan proses perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) pada 23 provinsi dan 125 kabupaten/kota. Berdasarkan data yang-data yang digunakan tersebut, didapatkan bahwa nilai IKEG Nasional pada tahun 2024 adalah 69,94 dengan target yakni 67,85. Dimana terjadi keenaikan rata-rata IKEG Nasional pada tahun 2024 sebesar 69,94 dibandingkan tahun 2024 sebesar 69,13. Diidentifikasi bahwa kenaikan nilai IKEG terjadi karena adanya pemekaran 4 provinsi baru di region Papua, perbaikan penutupan lahan, dan pendetailan peta Fungsi Ekosistem Gambut.



IKP

Dokumen KLHS yang terjamin Kualitasnya dan Terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Pada tahun 2024 berdasarkan target capaian kinerja sejumlah 40 dokumen KLHS yang tervalidasi. Direktorat PDLKWS tahun 2024 telah melakukan validasi 72 Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya serta terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program.



Pengembangan sistem informasi KLHS pada tahun 2024 dilaksanakan karena adanya Peraturan Menteri LHK Nomor 13 Tahun 2024 yang diundangkan pada tanggal 6 September 2024. Peraturan yang baru ini memberikan beberapa perubahan pada proses dan tahapan penyelenggaraan KLHS, sehingga perlu kembali disesuaikan layanan KLHS yang ada di dalam Sistem Informasi KLHS yang sudah dibangun sebelumnya pada tahun 2023.

Dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan KLHS RPJPD dan RPJMD Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan surat edaran kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Surat Edaran Nomor: S.54/MENLHK/PLA.1.1/B/3/2024 tanggal 8 Maret 2024 perihal Percepatan Pelaksanaan KLHS RPJPD dan KLHS RPJMD.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab untuk memastikan agar penyelenggaraan KLHS dapat diimplementasikan dengan baik di daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku, oleh karena itu maka dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas penyelenggaraan KLHS melalui bimbingan teknis. Bimbingan Teknis Penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD dilakukan di beberapa provinsi meliputi (1) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (2) Provinsi Jawa Barat, (3) Provinsi Nusa Tenggara Barat, (4) Provinsi Aceh, (5) Provinsi Kepulauan Riau, (5) Provinsi Jawa Timur, (7) Provinsi Nusa Tenggara Timur, (8) Provinsi Kalimantan Barat, (9) Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku Utara, (10) Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, (11) Lingkup Pulau Papua, dan (12) Provinsi Sulawesi Tenggara.

IKP

Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air

Penentuan kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi sebesar 65 juta hektar dilakukan dengan penyusunan informasi geospasial jasa lingkungan hidup tinggi. Penyusunan IG jasa lingkungan hidup tinggi dilakukan dengan kegiatan Pengembangan NSPK Jasa Lingkungan Hidup Tinggi dan Pengembangan Data dan Informasi.

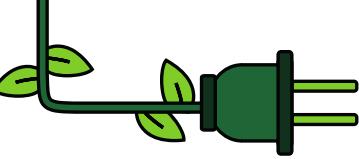
Pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan informasi geospasial jasa lingkungan hidup tinggi dilakukan oleh Direktorat PDLKWS dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pakar atau akademisi, unit pelaksana teknis, unit kerja lain, serta pihak ketiga lainnya. Pakar atau akademisi yang banyak terlibat meliputi pakar dari Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, dan Institut Pertanian Bogor. UPT Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) yang terlibat meliputi BPKHTL Wilayah 1 sampai dengan 22. Unit kerja lainnya meliputi Direktorat IPSDH, Direktorat KKH, dan Badan Informasi Geospasial.



Keluaran dari penyusunan informasi geospasial jasa lingkungan hidup tinggi yaitu:

1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi Jasa Lingkungan Hidup Tinggi
2. Panduan Pelaksanaan Verifikasi Jasa Lingkungan Hidup Tinggi
3. Dokumen Informasi Geospasial Jasa Lingkungan Hidup Tinggi
4. Draft Penetapan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi.





IKP

IELH yang Disusun dan Di implementasikan Dalam Pembangunan

Pada tahun anggaran 2024, terdapat 2 target output utama untuk bidang instrumen ekonomi lingkungan hidup, yakni: (1) NSPK Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) dan (2) Kajian Dana Penjaminan untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Identifikasi Jasa Lingkungan Hidup dalam rangka Pengembangan Model Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup (KIJLH)/ Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) di Taman Hutan Raya Sultan Adam. Kajian Penyusunan Tipologi Untuk Pengembangan Model Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup di Tahura Sultan Adam ini adalah untuk melengkapi berbagai informasi yang diperlukan untuk mengembangkan model pembayaran jasa lingkungan atau IELH lainnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jasa lingkungan di Tahura Sultan Adam, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja atau tinggal didalamnya. Dalam kajian ini, informasi-informasi tersebut disusun dalam 'kelompok intervensi' sesuai dengan keragaman karakteristik wilayah Tahura Sultan Adam untuk memudahkan identifikasi jasa lingkungan, kegiatan, indikator kinerja dan lokus penyediaan yang diperlukan dalam membangun model pembayaran jasa lingkungan hidup. Kelompok intervensi ini selanjutnya akan disebut sebagai Tipologi.

Sebagai tindaklanjut dari lahirnya PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi LH, hingga tahun 2024, telah mengalami perkembangan terbitnya peraturan dari beberapa mandat yang termuat di dalamnya. Pada tahun 2024 dilaksanakan monitoring dan evaluasi pada 2 sub-DAS terpilih yakni sub DAS Pusur dan Sub DAS Barito. Pemilihan kedua sub DAS tersebut dengan mempertimbangkan potensi penerapan instrumen ekonomi Pembayaran Jasa LH/ Kompensasi/ Imbal Jasa LH antar daerah.

Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion

Pada tahun 2024 telah ditetapkan Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 973 Tahun 2024 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional. Surat Keputusan Menteri ini berisi terkait penetapan D3TLH yang meliputi 3 focal area yaitu Lahan, Air dan Kehati. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup secara agregasi belum terlampaui, yang terlampaui hanya di Pulau Jawa saja.

Kegiatan penyusunan materi teknis D3TLH pada tahun 2024, dilakukan pemutakhiran metode penetapan D3TLH. Saat ini, sumber daya alam yang berpotensi terbarukan yang dihitung adalah air, lahan, laut, udara dan kehati. Metodologi dalam menentukan Indeks D3TLH membutuhkan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif oleh para pakar atau tenaga ahli melalui perhitungan matematis hingga visualisasi secara spasial.

Sebagai pembaharuan dengan kajian D3TLH sebelumnya, pada tahun ini juga menekankan bukan hanya dinilai dari kapasitas daya dukung tetapi juga daya tampung bagi SDA berpotensi terbarukan yang dinilai relevan untuk dihitung daya tampungnya. Untuk memudahkan dalam penyusunan indeks D3TLH maka disusun buku Petunjuk Teknis Penyusunan Indeks D3TLH, sebagai guideline atau petunjuk dalam penyusunan indeks D3TLH Nasional dan Daerah (Provinsi).

Perhitungan IPRLH merupakan hasil survei, wawancara dan *Focuss Group Disscusion (FGD)* perprovinsi tahun 2024 dengan pendekatan Teori *Knowledge-Attitude-Practice (KAP)* atau Pengetahuan, Sikap, dan Praktik. Metode pengambilan sampel menggunakan kombinasi *Purposive Sampling* dan Acak Stratifikasi pada 38 provinsi. Berdasarkan hasil analisis statistik, Indeks D3TLH di Indonesia secara agregat berada di kelas sedang (nilai indeks 0,57). Hal ini menunjukkan menunjukkan kondisi yang cukup seimbang antara pasokan sumber daya alam dan kebutuhan manusia, tetapi mulai mendekati batas kapasitas lingkungan.

Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa secara nasional, Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) didominasi oleh wilayah dalam kategori Tinggi, yang mencakup total luas 113,73 juta hektar atau sekitar 59,86% dari total luas Indonesia. Wilayah dalam kategori ini mencerminkan kapasitas lingkungan hidup yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan. Proporsi terbesar kategori tinggi berada di Pulau Papua (39,45 juta hektar) dan Pulau Kalimantan (34,23 juta hektar).



IKP

Jumlah Danau yang dikendalikan Kerusakannya

Target kinerja tahunan komponen pertama yaitu sebanyak 15 Danau Prioritas atau Laporan dalam periode Renstra 2025-2029. Sepanjang periode Renstra tersebut realisasi kinerja kegiatan ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan (*on the track*) atau dengan persentase realisasi sebesar 100%. Hal ini didasarkan pada banyaknya laporan hasil kegiatan dan rekomendasi kebijakan untuk kegiatan penyelamatan danau prioritas yang berasal dari 14 UPT BPDAS untuk 15 Danau Prioritas Nasional.

Capaian kinerja pada komponen IKK ini sama halnya dengan komponen sebelumnya yaitu 100% dengan capaian nilai perbandingan dengan tahun sebelumnya serta target renstra yaitu tetap (100%). Perolehan capaian tersebut didasarkan pada seluruh dokumen yang masuk dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Hal pembaharuan yang dilakukan dari tahun 2023 dan 2024 yaitu terkait dengan kepastian calon lokasi untuk kegiatan RHL yang berada di DTA Danau Prioritas. Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka memastikan perbaikan kualitas lingkungan hidup di sekitar danau prioritas. Selanjutnya, secara tidak langsung nantinya kegiatan tersebut dapat menumbuhkan perkonomian yang berada di masyarakat sekitar danau prioritas.

Secara keseluruhan nilai rata-rata yang dihasilkan dari dua komponen sebagai penyusun IKK pertama ini yaitu 100% (15 danau). Nilai tersebut tidak berubah dari target renstra, target PK dan target tahun sebelumnya.



Perahu nelayan yang sedang bersandar di Danau Limboto



Nelayan Danau Limboto



Jumlah Mata Air yang memiliki Rencana Pemulihannya

Perlindungan Mata Air merupakan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas mata air dengan melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap kerusakan mata air, serta kawasan sekitar mata air dan daerah resapan (imbuhan) mata air, agar fungsi dan manfaatnya lestari untuk kesejahteraan masyarakat.

Di Tahun 2024 ini, kegiatan dalam IKK terkendalinya kerusakan mata air dan tanah lebih diarahkan untuk menyusun dokumen rencana perlindungan mata air. Secara garis besar terdapat tiga tahapan untuk melaksanakan setiap target pada IKK ini yaitu 1) penentuan lokasi, 2) mengambil sampel air dan melakukan uji laboratorium, 3) menetapkan zonasi dan penilaian kerusakan mata air, dan 4) menyusun rencana perlindungan mata air.

Pencapaian kinerja IKK untuk tahun 2024 yaitu 50% berdasarkan target PK, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan automatic adjustment (AA) yang menyebabkan setengah dari target harus di cadangkan untuk diblokir. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya maka terjadi penurunan sebesar 50% (YoY).

Lain halnya apabila disandingkan dengan target renstra, dalam dua tahun terakhir (2023 dan 2024) realisasi kinerjanya hanya berada pada angka 33,33%. Hal ini disebabkan oleh karena kondisi APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi hutan difokuskan untuk pemenuhan dan percepatan kinerja rehabilitasi hutan dan lahan baik yang bersifat vegetatif maupun sipil teknis yang berada pada entitas terestrial maupun pesisir. Hal ini diupayakan untuk mendukung percepatan pencapaian target FOLU Net Sink Indonesia 2030.



Pengambilan data fisik dan kimia mata air



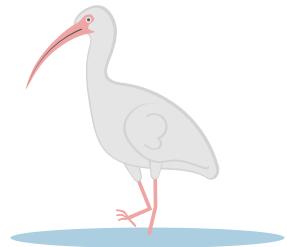
Jumlah Bangunan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

Kegiatan pembangunan Bangunan PKPD pada tahun 2024 memiliki target sejumlah 480 unit terbangun, dengan rincian 243 unit IPAH, 221 unit SRA, dan 16 unit Ekokhidrolika. Namun, sehubungan berlakunya kebijakan pemblokiran anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) atau *Automatic Adjusment* (AA) pada awal Tahun 2024, terdapat penyesuaian target kegiatan pembangunan Bangunan PKPD sehingga pada Tahun 2024 menjadi sejumlah 438 unit, dengan rincian 230 unit IPAH, 208 unit SRA, dan 0 unit Ekokhidrolika.

Seluruh BPDAS telah menyampaikan hasil pembangunan bangunan PKPD tahun 2024 di wilayah kerjanya pada acara “Ekspose Hasil Kegiatan Pembuatan Bangunan PKPD Tahun 2024”, dimana disampaikan rekapitulasi target awal, target pasca *Automatic Adjusment*, dan realisasi pembangunan fisik IPAH, SRA sebagaimana disajikan pada lampiran, namun *Automatic Adjusment* yang terjadi pada awal tahun 2024 mengharuskan adanya blokir anggaran sebesar Rp 2.246.857.000,00 pada program Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) sehingga diperlukan penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatannya. Salah satu kegiatan yang paling terdampak yakni pembangunan ekohidrolika di 8 (delapan) BPDAS, dimana semula ditargetkan sebanyak 16 (enam belas) unit, akan tetapi terjadi penyesuaian menjadi 0 (nol) unit atau tidak terdapat target kinerja pada kegiatan ini.

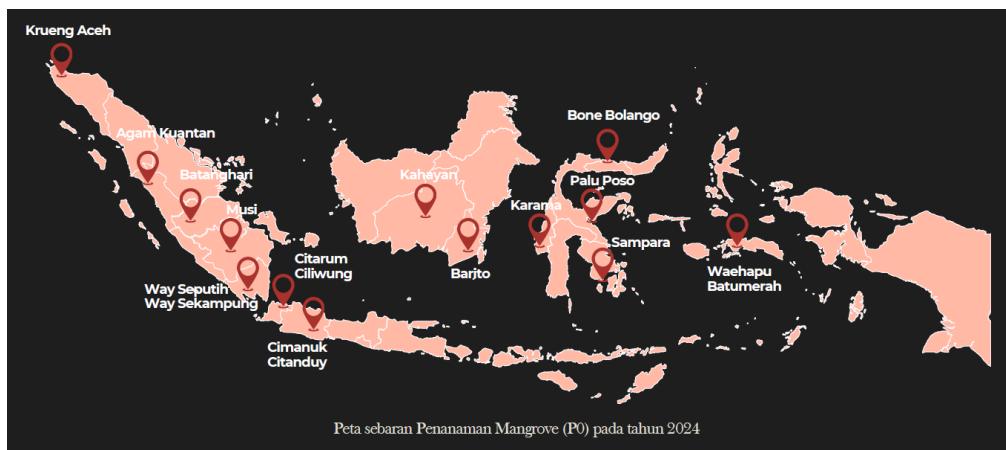
Secara total realisasi pembangunan bangunan PKPD pada Tahun 2024 sebesar 100,21% (berdasarkan target awal PK 2024) atau sebesar 109,82% (berdasarkan target PK apabila revisi AA sudah dihapus).

Prestasi yang diraih BPDAS atas capaian pembangunan bangunan PKPD terutama IPAH dan SRA tersebut disebabkan adanya optimalisasi anggaran yang ada dan/atau mensinergikan pembangunan IPAH dan SRA menjadi satu kesatuan/terintegrasi sehingga menghemat biaya. Selain itu bentuk penghematan lain yang dilakukan guna efisiensi anggaran adalah dengan melakukaan koordinasi dan rapat pembahasan/evaluasi secara daring melalui *zoom meeting*.



Terehabilitasinya Hutan Mangrove

Direktorat RPDM telah melaksanakan kegiatan Penanaman sebanyak 700 Ha yang tersebar di 14 wilayah kerja UPT BPDAS. Direktorat RPDM pun telah berhasil melaksanakan kegiatan Pemeliharaan untuk P1 serta P2 dengan luasan P1 sebesar 747 Ha dan P2 sebesar 1.206 Ha. Selain itu Direktorat RPDM telah melaksanakan kegiatan Kelompok Kerja Mangrove Daerah dengan fokus kegiatan pada tahun 2024 selain berkoordinasi dengan pihak Stakeholder juga secara langsung terjun memberikan arahan dan edukasi kepada warga sekitar mengenai pentingnya pelestarian terhadap hutan mangrove. Dengan telah dilaksanakannya kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat RPDM khususnya pada IKK Terehabilitasinya Hutan Mangrove, diharapkan Hutan Mangrove yang telah terehabilitasi dapat terus tumbuh dan lestari di alam dan juga dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sekitar.



Pada tahun 2024, kesuksesan pelaksanaan kegiatan Penanaman Mangrove (PO) terlihat dari realisasi yang melampaui target yaitu sebesar 725 Ha dengan presentasi keberhasilan sebesar 103,57%. Presentasi ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 105,96%. Hal ini dikarenakan adanya Optimalisasi Anggaran yang dilakukan pada tahun 2023 yang mengakibatkan bertambahnya realisasi fisik yang dilakukan di beberapa UPT BPDAS. Sedangkan untuk penambahan 25 hektar pada tahun 2024 yang terjadi di UPT BPDAS Citarum Ciliwung dikarenakan adanya optimalisasi sisa anggaran akibat pola tanam dari rancangan teknis semula sehingga menjadikan pelaksanaan kegiatan penanaman pada tahun 2024 bertambah dari target awal sebesar 700 Hektar.





03

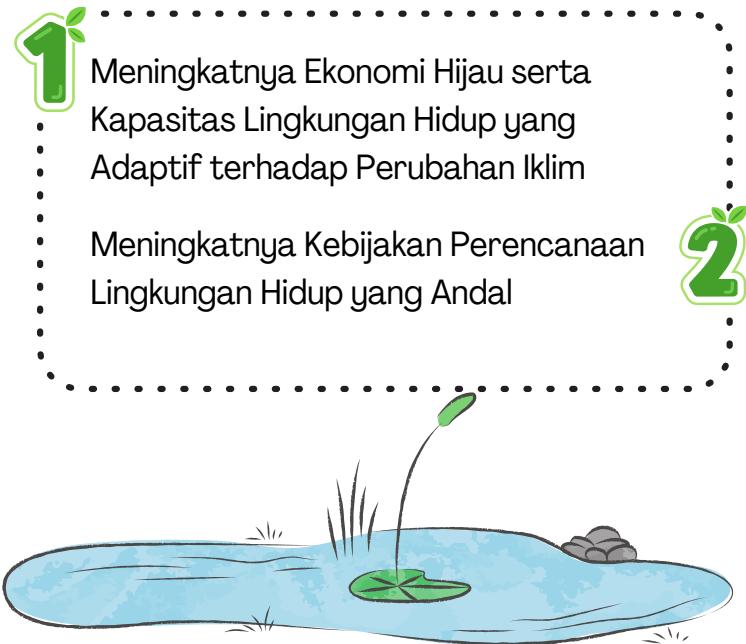
RENCANA KERJA TAHUN 2025



SASARAN STRATEGIS

Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (TLSADB) memiliki sasaran strategis yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Dalam *Stakeholder Perspective*, Deputi Bidang TLSADB menekankan penerapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) secara nasional. Hal ini dilakukan dengan memfasilitasi penyusunan RPPLH di tingkat daerah dan memberikan rekomendasi kebijakan penerapan RPPLH. Program Gambut Lestari dan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem juga berkontribusi untuk memastikan kebijakan lingkungan hidup berbasis data yang mencerminkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Langkah ini sejalan dengan sasaran KLH untuk menghasilkan kebijakan perencanaan yang andal dan berbasis ilmiah.



Melalui *Customer Perspective*, Deputi Bidang TLSADB mengembangkan layanan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berbasis daya dukung dan daya tampung, yang menjadi dasar perencanaan ekonomi hijau. Layanan ini juga didukung dengan validasi dokumen lingkungan seperti AMDAL dan penyederhanaan perizinan lingkungan, seperti penerbitan SKKL dan PKPLH, guna mempercepat implementasi kebijakan lingkungan di sektor usaha dan kegiatan. Upaya ini memperkuat arah pembangunan rendah karbon dan adaptif terhadap perubahan iklim.



Foto oleh: Mike Mijares

Pada *Internal Process Perspective*, Deputi Bidang TLSDAB fokus pada pengembangan sistem informasi lingkungan hidup yang mencakup data daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH). Selain itu, evaluasi, pemantauan, serta inventarisasi data kualitas ekosistem menjadi prioritas untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti. Pendekatan ini memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mengintegrasikan teknologi modern untuk mendukung adaptasi lingkungan hidup terhadap tantangan perubahan iklim.

Kemudian melalui *Learning and Growth Perspective*, Deputi Bidang TLSDAB memprioritaskan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis terkait dampak lingkungan dan restorasi gambut. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang lingkungan juga menjadi pilar penting untuk memastikan kebijakan yang konsisten dan terarah. Secara lebih jauh, penguatan kelembagaan dan kemitraan dilakukan untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dalam rangka mendukung keberlanjutan ekosistem dan pengurangan risiko lingkungan.



Stakeholder Perspective



- Penerapan RPPLH (Fasilitasi penyusunan RPPLH daerah dan penyusunan rekomendasi kebijakan penerapan RPPLH)
- Program Gambut Lestari (Fasilitasi dan pembinaan program gambut lestari didaerah dan peningkatan kapasitas terkait SDM KLHS)
- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem (Penyusunan RPEM dan RPEG dan penyusunan NSPK perlindungan dan pengelolaan ekosistem)

Customer Perspective

- Layanan Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS (Validasi KLHS daerah berbasis daya dukung dan daya tampung dan peningkatan kapasitas terkait SDM KLHS)
- Layanan permohonan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan (Penilaian AMDAL, adendum, serta penerbitan EKKL, pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan persetujuan PKPLH)



Internal Process Perspective



- Pengembangan Sistem Informasi (Sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan sistem informasi D3TLH)
- Evaluasi dan Pemantauan (Pemantauan tinggi muka air di lahan gambut, penilaian mutu dokumen AMDAL dan audit lingkungan hidup, evaluasi tindak lanjut permasalahan dokumen lingkungan hidup)
- Inventarisasi dan Pemetaan (Pemetaan indikasi sebaran wilayah dampak lingkungan dan pengembangan data dan informasi kualitas ekosistem gambut)

Learning and Growth Perspective

- Pengembangan Kapasitas SDM (Pelatihan teknis sistem kajian dampak lingkungan dan edukasi dan sosialisasi restorasi gambut)
- Pengembangan NSPK (Penyusunan NSPK bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan dan penyusunan NSPK perlindungan dan pengelolaan ekosistem)
- Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan (Pembentukan desa mandiri peduli gambut dan penguatan kelembagaan restorasi gambut)



Sasaran strategis Deputi Bidang TLSDAB secara langsung berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis KLH. Dengan meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan lingkungan hidup dan mendorong transisi menuju ekonomi hijau yang adaptif terhadap perubahan iklim, Deputi Bidang TLSDAB memainkan peran kunci dalam mengintegrasikan pendekatan tata kelola lingkungan yang inovatif, efektif, dan berkeadilan.

Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Fokus utama Deputi Bidang TLSDAB adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam seluruh kebijakan, rencana, dan program yang Deputi TLSDAB jalankan. Target Deputi TLSDAB adalah menghasilkan 122 rekomendasi kebijakan yang secara komprehensif mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Selain itu, Deputi Bidang TLSDAB juga berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan dalam proses perizinan berusaha. Tujuannya adalah untuk mencapai persentase penerbitan perizinan yang terkait dengan persetujuan lingkungan sebesar 65%. Hal ini menunjukkan komitmen Deputi Bidang TLSDAB untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak merugikan lingkungan dan masyarakat.

Dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem, Deputi Bidang TLSDAB akan fokus pada rehabilitasi dan restorasi ekosistem mangrove dan gambut. Target Deputi TLSDAB adalah merehabilitasi 749 hektar ekosistem mangrove dan merestorasi 155.880 hektar ekosistem gambut. Upaya ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Secara keseluruhan, arah kebijakan Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan adalah untuk:

1. Memastikan bahwa semua kebijakan dan program yang Deputi Bidang TLSDAB jalankan selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan dalam proses perizinan berusaha.
3. Melakukan upaya aktif dalam rehabilitasi dan restorasi ekosistem yang rusak.

Dengan demikian, Deputi Bidang TLSDAB berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan.

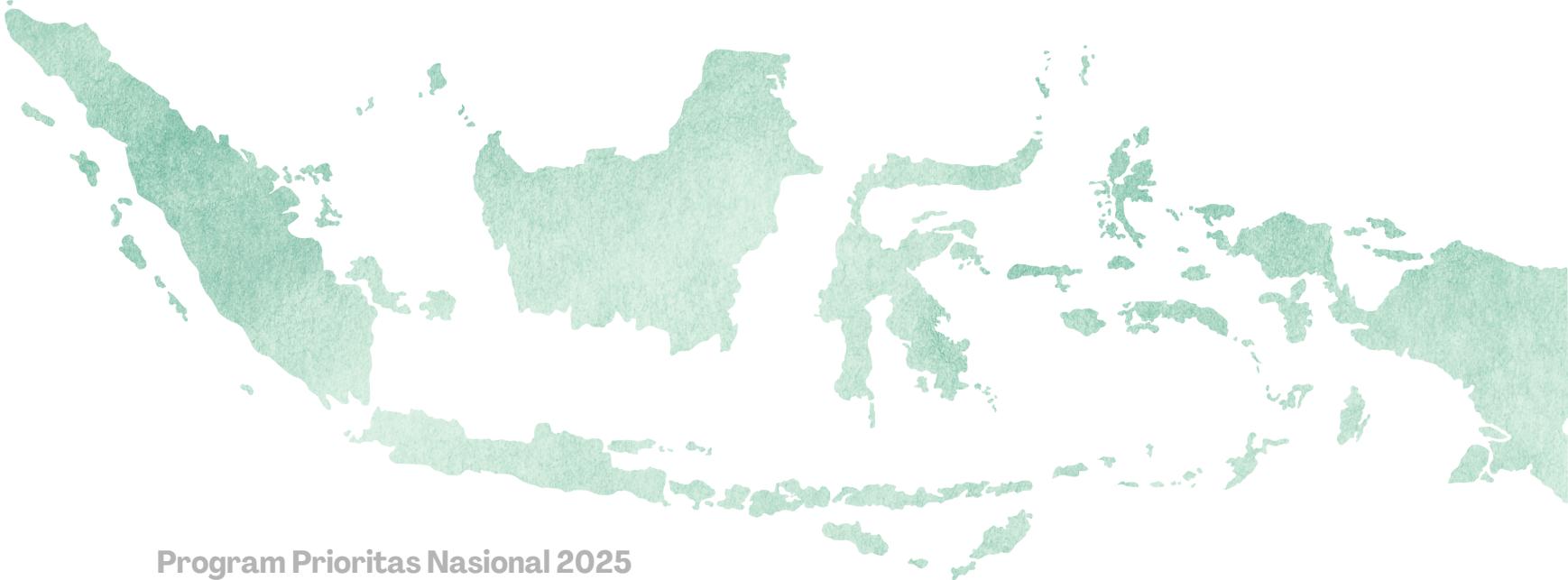
Kebijakan Nasional 2025

Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (TLSDAB) berperan strategis dalam mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Sasaran strategis Deputi Bidang TLSDAB diarahkan untuk meningkatkan kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang andal, salah satunya melalui penerapan RPPLH Nasional, penyusunan RPPLH daerah, dan fasilitasi Program Gambut Lestari yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Program ini memastikan pembangunan ekonomi tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim. Upaya pemulihian ekosistem, seperti gambut dan mangrove, tidak hanya berfungsi menjaga keseimbangan ekologis, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, seperti peningkatan hasil perikanan, pariwisata ekowisata, dan pengelolaan karbon biru.

Selain itu, layanan KLHS dan perizinan lingkungan yang efisien, didukung oleh pengembangan teknologi modern seperti sistem informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, memperkuat tata kelola lingkungan yang berbasis bukti, menciptakan iklim investasi ramah lingkungan, dan meningkatkan kapasitas SDM serta kolaborasi lintas sektor. Melalui langkah-langkah ini, Deputi Bidang TLSDAB memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat, mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai tema RKP 2025.



Foto oleh: Akhmad Thamrin



Program Prioritas Nasional 2025

Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagai pijakan strategis dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, yaitu terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu misi utama dalam RPJPN adalah memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi yang berfokus pada upaya menciptakan lingkungan hidup berkualitas. Misi ini secara langsung sejalan dengan agenda Indonesia Emas 2045, terutama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan memastikan daya dukung serta daya tampung lingkungan yang memadai bagi generasi mendatang.

Dalam kerangka ini, rencana kerja Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (TLSDAB) memegang peranan penting dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Deputi Bidang TLSDAB berfokus pada penguatan kebijakan perencanaan lingkungan yang berbasis daya dukung dan daya tampung, seperti penerapan RPPLH Nasional, penyusunan RPPLH daerah, dan fasilitasi Program Gambut Lestari yang mendukung restorasi ekosistem penting. Selain itu, Deputi Bidang TLSDAB juga memprioritaskan pengembangan sistem informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terintegrasi, layanan perizinan lingkungan yang andal, serta evaluasi dan pemantauan dampak lingkungan yang berbasis bukti. Semua program ini bertujuan untuk mendukung keberlanjutan ekologis, mendukung ekonomi hijau, dan meningkatkan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan langkah-langkah tersebut, Deputi Bidang TLSDAB berkontribusi nyata dalam mewujudkan misi ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2025-2045 dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.





Foto oleh: Ken Mwaura

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menyambut tahun awal pemerintahan dalam periode RPJMN 2025–2029, Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan terus menapaki jalur perubahan menuju tata kelola lingkungan dan sumber daya alam yang berintegritas, efisien, serta berwawasan keberlanjutan. Semangat transformasi ini diwujudkan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja, serta optimalisasi implementasi kebijakan berbasis data dan hasil.

Pada tahun 2025, Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan mengembangkan satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian yaitu, **Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**. Indikator tersebut merupakan ukuran yang harus diperoleh sebagai representasi atas keberhasilan program yang dilakukan oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Target capaian yang akan dicapai adalah **0, 567 poin**.

SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM

DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN

No.	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program
1.	Meningkatnya Penguanan Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup	Presentase KRP yang Menerapkan Perlindungan LH untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Ekosistem Esensial	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) Indeks Kesehatan Ekosistem Perairan Darat *Tingkat Status Kerusakan Ekosistem Danau/Mata Air (lokasi per lokus) Indeks Kesehatan Ekosistem Mangrove
3.	Meningkatnya penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan	Presentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan
4.	Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi KLH yang agile, efektif, dan efisien	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indeks Pelayanan Publik terkait dengan perizinan lingkungan
5.	Meningkatnya laporan keuangan KLH yang transparan dan akuntabel	Nilai ma turitas SPIP Terintegrasi KLH/BPLH

Indikator Kinerja Program (IKP) Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2025 disusun untuk mengukur capaian pelaksanaan program prioritas di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. IKP ini menjadi acuan dalam memperkuat kebijakan, meningkatkan kualitas ekosistem esensial, serta mengoptimalkan layanan perizinan lingkungan guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

KEGIATAN

DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN

No.	Kegiatan	Unit Kerja
1.	7515-Pencegahan Dampak Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK)• Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS)
2.	7516-Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">• Direktorat Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (PSDAB)
3.	7517-Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	<ul style="list-style-type: none">• Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG)
4.	7518-Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat	<ul style="list-style-type: none">• Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Perairan Darat (PPEPD)
5.	7542-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">• Tata Usaha Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (TU TLSDAB)

Pelaksanaan kegiatan pada Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program melalui penguatan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan teknis di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Setiap kegiatan dirancang agar berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan program, optimalisasi capaian kinerja, serta terwujudnya tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika pembangunan nasional.

UNIT KERJA ESELON II

DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN

Pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dilaksanakan melalui unit-unit kerja Eselon II yang memiliki tugas dan fungsi sesuai bidang tanggung jawabnya. Masing-masing unit kerja berperan dalam mengoordinasikan, melaksanakan, serta memantau kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran program Deputi Bidang TLSDAB, baik dalam aspek perumusan kebijakan, pelaksanaan teknis, maupun dukungan manajemen untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Terdapat 5 unit kerja di lingkup Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, yaitu Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK), Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS) , Direktorat Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (PSDAB), Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG), Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat (PPEPD).



Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK)



Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS)



Direktorat Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (PSDAB)



Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG)



Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat (PPEPD)



Foto oleh: Kamchatka

KERANGKA PENDANAAN

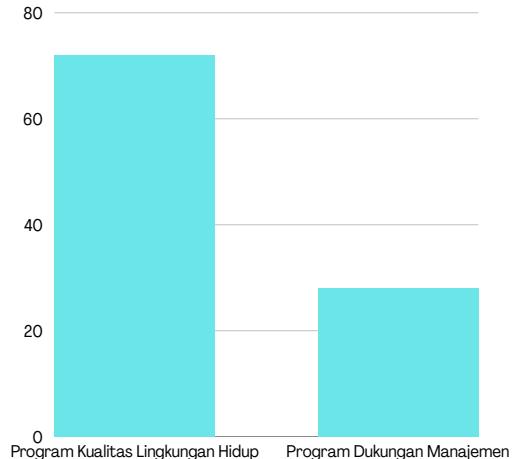
DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN

Pagu Alokasi Anggaran

Rp. 82.139.927.000

1 Program Kualitas Lingkungan Hidup
Rp. 58.845.216.000

2 Program Dukungan Manajemen
Rp. 23.294.711.000



Penandaan anggaran merupakan praktik mengidentifikasi, mengukur, dan memantau kegiatan dan pengeluaran yang relevan dengan isu-isu tertentu. Informasi yang dihasilkan dari penandaan anggaran dapat digunakan untuk analisis dan ulasan terhadap kebijakan atas isu, perencanaan atau penganggaran, atau untuk memperkuat akuntabilitas atas komitmen mengatasi isu dimaksud. Besar anggaran belanja atau pagu alokasi anggaran Kementerian LH/BPLH berdasarkan Memorandum Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor M.06/A/C/REN.2.1/8/02/2025 adalah sebesar Rp. 1.079.782.944.000,-.

Dalam rangka mempercepat transformasi birokrasi yang berpengaruh terhadap akselerasi transformasi ekonomi, besar anggaran untuk Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan adalah sebesar Rp.82.139.927.000,- dengan alokasi pagu untuk program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp.58.845.216.000,- sedangkan alokasi anggaran untuk Program dukungan manajemen sebesar Rp.23.294.711.000,-.

PAGU ANGGARAN

DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN

No.	Kegiatan	Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025
1.	7515-Pencegahan Dampak Lingkungan	Rp. 18.355.828.000
2.	7516-Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Rp. 13.244.833.000
3.	7517-Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Rp. 14.950.891.000
4.	7518-Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat	Rp. 12.293.664.000
5.	7542-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Rp. 23.294.711.000

Pagu anggaran per jenis kegiatan pada Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2025 disusun berdasarkan prioritas program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, optimalisasi capaian kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Dengan alokasi pagu anggaran tersebut, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2025 dapat berjalan efektif, efisien, serta tepat sasaran. Penggunaan anggaran akan difokuskan untuk mendukung prioritas nasional di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, serta memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.



Foto oleh: Irwan Susanto

04

PENUTUP

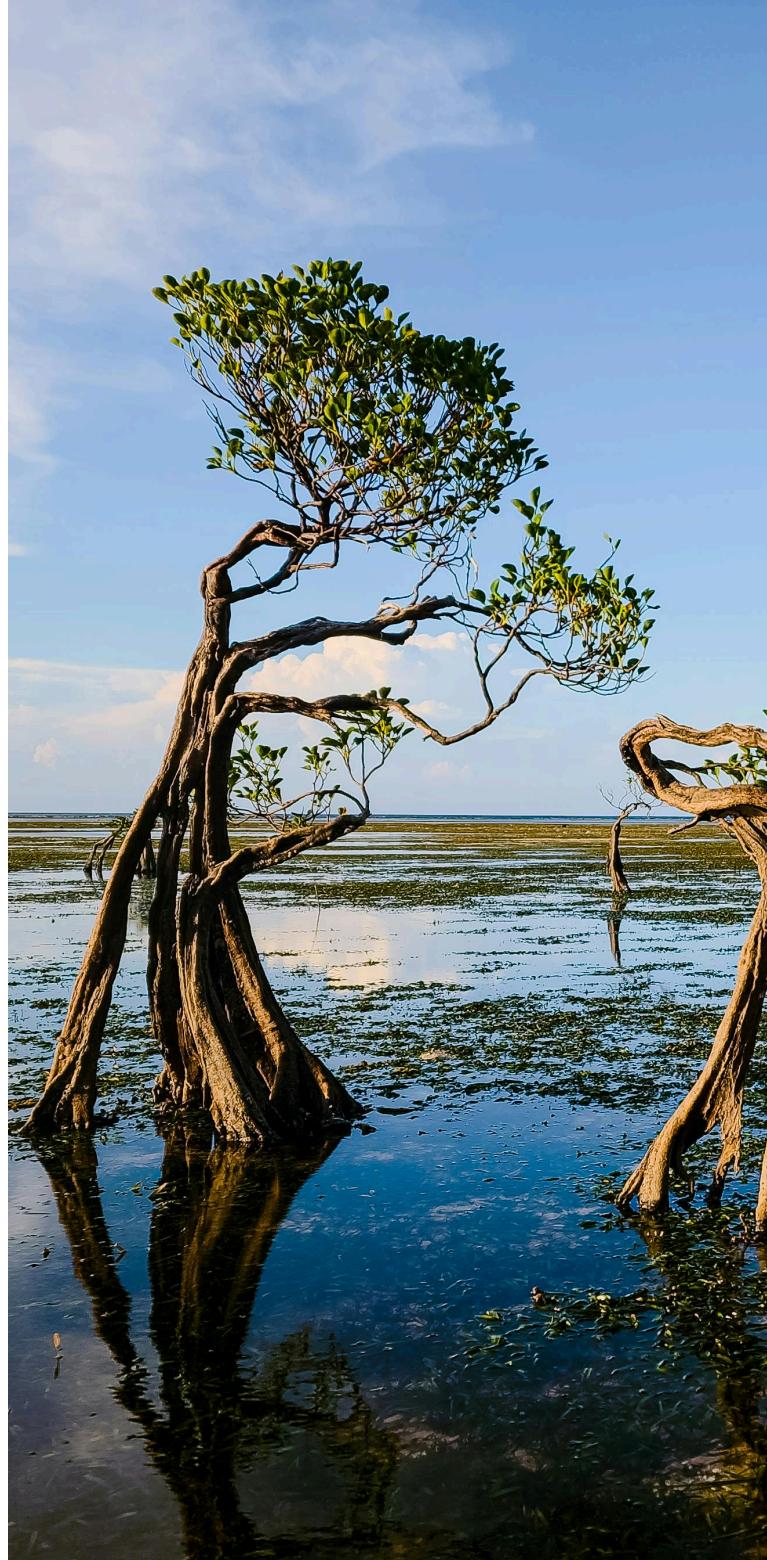


PENUTUP RENCANA KERJA TAHUN 2025

DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN

Rencana kerja ini menjadi pedoman utama bagi Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (TLSDAB) dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dengan fokus pada peningkatan kualitas kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang berbasis daya dukung dan daya tampung, pemulihian ekosistem, penguatan ekonomi hijau, dan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, rencana kerja ini sejalan dengan visi besar RPJPN 2025-2045 dan tema RKP 2025, yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan."

Rencana kerja ini juga menjadi acuan kerja seluruh unit di bawah Deputi Bidang TLSDAB untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka secara terarah, terukur, dan akuntabel. Melalui sinergi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta optimalisasi inovasi dan teknologi, Deputi Bidang TLSDAB berkomitmen mendukung terwujudnya lingkungan hidup berkualitas sebagai fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi rencana kerja ini diharapkan dapat memberikan dampak positif nyata dalam upaya pencapaian Indonesia Emas 2045 yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan.



05

LAMPIRAN



TABEL CASCADING KINERJA TAHUN 2025

DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	ANGGARAN	
Kualitas Lingkungan Hidup	T1.SS.SP1	T1.SS.SP1.1	7515- Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.SS.SP1.SK1	T1.SS.SP1.SK1.1	Layanan KLHS dan instrumen lingkungan hidup yang terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan program	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	002- Layanan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang Terjamin Kualitasnya dan Terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	18 Layanan	4,928,360,000
					T1.SS.SP1.SK1.2	Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	002-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	1 Rekomendasi Kebijakan	542,435,000
			7515- Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.SS.SP1.SK2	T1.SS.SP1.SK3	D3TLH Nasional yang disusun, ditetapkan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program	QMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	38 Data	1,731,310,000
			7516- Penyelenggaran Sumber Daya Alam Berkelanjutan	T1.SS.SP1.SK3	T1.SS.SP1.SK3.1	Percentase rekomendasi kebijakan terkait dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah dengan ekosistem rentan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Penerapan RPPLH Nasional	15 Rekomendasi Kebijakan	2,960,000,000
							PEB-Forum	001-Forum Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	7 Forum	1,012,094,000
			7516- Penyelenggaran Sumber Daya Alam Berkelanjutan	T1.SS.SP1.SK4	T1.SS.SP1.SK4.1	Tersusunnya dokumen inventarisasi lingkungan hidup ekoregion	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Dokumen Inventarisasi Lingkungan Hidup Ekoregion	27 Dokumen	8,554,750,000
						Data dan informasi inventarisasi lingkungan hidup ekoregion yang disusun menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program	QMA-Data dan Informasi Publik	002-Inventarisasi dan Verifikasi Lingkungan Hidup	38 Dokumen	717,989,000



TABEL CASCADING KINERJA TAHUN 2025

DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRO	RO	SATUAN	ANGGARAN	
	T2.SS.SP7	T2.SS.SP7.1		T2.SS.SP7.SK1	T2.SS.SP7.SK1.1 Data kesehatan ekosistem perairan darat	10 Dokumen	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Publik Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat	10 dokumen	1,774,813,000	
		Indeks Kesehatan Eko sistem Perairan Darat *Tingkat Status Kerusakan Eko sistem Danau/Mata Air (lokasi per lokus)	7518-Perlindungan dan Pengelolaan Eko sistem Perairan Darat	Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem perairan darat	T2.SS.SP7.SK1.2 Jumlah rekomendasi kebijakan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem perairan darat yang difasilitasi penyusunannya	10 Rekomendasi kebijakan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem (RPPE) Perairan Darat	10 Rekomendasi Kebijakan	1,300,000,000	
					T2.SS.SP7.SK1.3 Daerah yang difasilitasi pengembangan area terpadu perlindungan dan pengelolaan ekosistem perairan darat	19 Daerah	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Pengembangan Area terpadu Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat	19 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2,925,187,000	
		T2.SS.SP7.2		T2.SS.SP7.SK2	T2.SS.SP7.SK2.1 Data kesehatan eko sistem Mangrove	3 Dokumen	QMA-Data dan Informasi Publik	002-Data dan Informasi Publik Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove	3 dokumen	1,250,000,000	
Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Eko sistem Esensial	Indeks Kesehatan Eko sistem Mangrove	7518-Perlindungan dan Pengelolaan Eko sistem Perairan Darat	Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove	T2.SS.SP7.SK2.2 Jumlah rekomendasi kebijakan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang difasilitasi penyusunannya	3 Rekomendasi Kebijakan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	002-Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem (RPPE) Mangrove	3 Rekomendasi Kebijakan	750,000,000	
					T2.SS.SP7.SK2.3 Daerah yang difasilitasi pengembangan area terpadu perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove	15 Daerah	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Pengembangan Area terpadu Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)	4,293,664,000	
		T2.SS.SP7.3		T2.SS.SP7.SK3	T2.SS.SP7.SK3.1 Tersedianya data pemantauan ekosistem gambut	10 PETA	QMA-Data dan Informasi Publik	006-Data dan informasi kualitas ekosistem gambut	10 Peta	2,876,557,000	
					7517-Perlindungan dan Pengelolaan Eko sistem Gambut	100 Industri	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	004-Layanan Penilaian kinerja lingkungan untuk pengelolaan ekosistem	100 Industri	1,417,944,000	
					T2.SS.SP7.SK4	T2.SS.SP7.SK4.1 Menurunnya tingkat kerusakan gambut					
					T2.SS.SP7.SK5	T2.SS.SP7.SK5.1 Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	950 Hektar	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Eko sistem	002-Lahan gambut yang dipulihkan	950 Hektar	4,316,666,000
						T2.SS.SP7.SK5.2 Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (gambut lestan)	148 Daerah (Prov/Kab/Kota)	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Program Gambut Lestari	148 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1,110,317,000
						T2.SS.SP7.SK5.3 Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 42 19 Provinsi	20 Desa	UBB-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	001-Program Desa Mandiri Peduli Gambut	20 Desa	5,229,407,000

TABEL CASCADING KINERJA TAHUN 2025

DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KRO	RO	SATUAN	ANGGARAN	
	T2.SS.SP10	T2.SS.SP10.1		T2.SS.SP10.SK1	T2.SS.SP10.SK1.1 Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumentasi lingkungan hidup	15 Rekomendasi Kebijakan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	003-Penerapan kajian dampak lingkungan	15 Rekomendasi Kebijakan	1,500,000,000,00	
			7515-Pencegahan Dampak Lingkungan	T2.SS.SP10.SK1.2	Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumentasi lingkungan hidup		1 Sistem Informasi	UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup yang Dikembangkan	1 Sistem Informasi	6,650,000,000
				T2.SS.SP10.SK2	T2.SS.SP10.SK2.1 Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan	600 Layanan	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	600 Layanan	2,803,723,000	
Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan	Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan	7515-Pencegahan Dampak Lingkungan	T2.SS.SP10.SK3	T2.SS.SP10.SK3.1 Tersedianya dokumen identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi		2 Dokumen	QMA-Data dan Informasi Publik	003-Dokumen Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Indikatif Sebaran Wilayah Prakiraan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Tingkat Nasional	1 Dokumen	150,000,000
			7515-Pencegahan Dampak Lingkungan		Peta indikatif sebaran wilayah prakiraan dampak lingkungan usaha dan kegiatan terlanyai			QMA-Data dan Informasi Publik	004-Data Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Indikatif Sebaran Wilayah Prakiraan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan	1 Dokumen	50,000,000
	T4.SS.SP2	T4.SS.SP2.1	7542-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kinerja Instansi Pemerintah KLH	T4.SS.SP2.SK4	T4.SS.SP2.SK4.1 Meningkatnya nilai SAKIP pada Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan		74 Poin	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	956-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Unit	13,900,000
Dukungan Manajemen	Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi KLH yang agile, efektif, dan efisien	Indeks Pelayanan Publik terkait dengan Perizinan Bidang Tata Lingkungan dan	7542-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Tata Lingkungan dan	T4.SS.SP2.SK20	T4.SS.SP2.SK20.1 Meningkatnya layanan persetujuan lingkungan bidang tata lingkungan dan sumber daya alam berkelanjutan		3.51 Poin	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Layanan	24,000,000
								EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	23 Layanan	3,566,655,000
	T4.SS.SP3	T4.SS.SP3.1	7542-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Tata Lingkungan dan	T4.SS.SP3.SK10	T4.SS.SP3.SK10.1 Meningkatnya nilai maturitas SPIP pada Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan		3.79 Poin	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	23 Layanan	14,664,404,000

